

Situasi Politik di Negara-negara ASEAN Dewasa Ini*

Jusuf WANANDI

CATATAN UMUM

Sejak dasawarsa 1970-an negara-negara ASEAN telah mengalami suatu kemajuan yang besar, apakah itu dalam bidang-bidang sosial dan ekonomi ataupun dalam bidang-bidang politik dan keamanan. Dilihat dari masing-masing negara ASEAN sendiri, kemajuan-kemajuan ASEAN tersebut sangat penting artinya. Kemajuan-kemajuan tersebut lebih mengesankan lagi bila ditinjau dengan memperbandingkannya dengan kawasan-kawasan lainnya di dunia, seperti Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin.

Terdapat sejumlah faktor yang dapat menerangkan bagi adanya perkembangan-perkembangan yang menggembirakan di kawasan ASEAN. Akan tetapi ada dua faktor yang sangat menonjol. *Pertama*, adalah kemampuan dari kepemimpinan nasional di setiap negara ASEAN dalam menilai secara tepat hakikat ancaman terhadap negara dan bangsa dengan demikian juga dalam menentukan prioritas utama untuk pembangunan nasionalnya. Kemampuan demikian itu merupakan hasil bukan saja dari peranan yang ditampilkan oleh pemimpin-pemimpin nasional tersebut tetapi juga oleh semakin mantap dan makin berfungsinya lembaga-lembaga baik sosial, politik maupun birokrasi.

Faktor *kedua*, berkaitan dengan lingkungan kawasan yang lebih stabil, yang mendukung usaha-usaha pembangunan nasional. Sebenarnya, tidak hanya Kawasan Asia Tenggara saja yang telah lebih memberikan dorongan bagi pembangunan nasional di negara-negara ASEAN. Stabilitas Kawasan Asia-Pasifik secara keseluruhan telah sangat diperteguh oleh perkembangan-perkembangan yang menguntungkan di Kawasan Asia Timur Laut dan Asia Tenggara, yang saling pengaruh-mempengaruhi.

*Diterjemahkan oleh A.R. SUTOPO.

Kedua faktor yang disebutkan di atas saling berkaitan satu dengan lainnya. Selaras dengan ASEAN Concord, yang disepakati pada Pertemuan Puncak ASEAN di Bali pada tahun 1976 dan tetap berlaku hingga kini, perhatian utama dari masing-masing pemimpin ASEAN adalah dalam menangani tantangan-tantangan dari dalam yang timbul sebagai akibat dari semakin tingginya keinginan dan meningkatnya tuntutan-tuntutan kebutuhan rakyat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Ini tidak hanya berarti kebutuhan akan lebih banyak pangan, sandang dan fasilitas perumahan, tetapi juga terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik, maupun terhadap partisipasi yang lebih besar dalam proses politik, kebebasan yang lebih besar dalam mencari keadilan sosial, tegaknya hukum, dan perkembangan kehidupan demokrasi. Para pemimpin ASEAN memahami hal-hal tersebut sebagai tugas utamanya dalam mengatasi ancaman terhadap bangsa dan negara mereka, yang -- pada hakikatnya -- merupakan ancaman dari dalam sendiri.

Dibandingkan dengan keadaan satu dasawarsa yang silam, ancaman utama dari dalam terhadap negara-negara ASEAN bukan lagi berbentuk pemberontakan-pemberontakan dan subversi atau infiltrasi yang mendukung pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri (gerakan-gerakan separatis, keagamaan, dan komunis). Jenis-jenis kegiatan tersebut masih ada tetapi tidak terlalu penting, dalam arti bahwa mereka mampu menciptakan frustrasi terhadap pemerintah nasional yang berakibat terhadap realokasi sumber-sumber daya yang memang sudah langka di luar program-program pembangunan nasional. Gerakan-gerakan tersebut tampaknya tidak mampu mengguncangkan masing-masing negara sehingga memaksa pemerintahan nasional yang sah untuk mundur.

Apabila demikian halnya, tantangan utama negara-negara ASEAN tetap merupakan suatu pekerjaan yang rumit -- dan menjadi lebih rumit -- untuk diselesaikan secara tuntas. Pemberontakan-pemberontakan, subversi, atau infiltrasi mempunyai bentuk-bentuk yang nyata dan karena itu lebih mudah diatasi. Akan tetapi tantangan-tantangan pembangunan bersifat lebih luas dan menyangkut seluruh sendi-sendi kehidupan, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan, secara serempak.

Pada tahap-tahap awal dari pembangunan nasional prioritas diberikan pada pembangunan ekonomi sebagai syarat pembangunan lebih lanjut. Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang sangat penting dalam meletakkan dasar legitimasi bagi pemerintahan nasional, khususnya dalam masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang yang mengalami penderitaan dari masa kolonial yang lalu. Maka harus dilakukan penundaan-penundaan atas upaya-upaya pembangunan di bidang-bidang lainnya sebagai suatu pengorbanan sementara demi tercapainya sasaran-sasaran jangka panjang.

Pembangunan ekonomi di negara-negara ASEAN sejak dasawarsa 1970-an sangat berhasil dan prospeknya tetap cerah meskipun perekonomian ASEAN dewasa ini sedang menghadapi tekanan-tekanan yang berat, terutama karena adanya resesi global yang berkepanjangan.

Namun kemajuan dalam pembangunan ekonomi membawa serta kerumitan-kerumitan baru terhadap pembangunan masing-masing masyarakat: nilai-nilai tradisional harus memberi kesempatan dan menyesuaikan diri (beradaptasi) kepada tantangan-tantangan pembangunan yang baru dan kepada pengaruh internasional. Kelas menengah yang sedang tumbuh tidak lagi puas dengan pembangunan fisik saja dan menuntut kualitas hidup yang lebih tinggi, yang di antaranya termasuk hak-hak politik yang lebih besar, partisipasi yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan di masa depan, dan jaminan hukum.

Pembangunan ekonomi saja tidak dapat memuaskan seluruh penduduk, berhubung sebagian dari warga masyarakat akan memperoleh/menikmati lebih banyak dibandingkan bagian-bagian masyarakat yang lain, dan bahkan sebagian lainnya barangkali "terkorbankan" dalam proses. Jadi, cepat atau lambat, pembangunan sosial dan politik diperlukan untuk mengoreksi akibat-akibat sampingan dari pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar minimum bagi setiap anggota masyarakat, dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pembangunan politik adalah penting karena berbagai alasan: *Pertama*, dalam pengembangan suatu sistem pemerintahan dan suatu sistem politik pada umumnya yang mampu mengakomodasi baik nilai-nilai yang tumbuh di dalam sendiri maupun pengaruh-pengaruh internasional. Sistem yang muncul dari proses demikian itu bukanlah suatu sistem demokrasi liberal seperti sistem Barat, tetapi adalah suatu sistem di mana kepentingan-kepentingan individual dapat diselaraskan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Yang penting juga adalah pengakuan dari masing-masing pemerintah dan para pemimpin sosialnya bahwa sistem itu akan selalu berkembang secara bertahap sebagai akibat dari pendidikan yang lebih baik, adanya komunikasi dan hubungan-hubungan internasional yang lebih intensif, dan perkembangan lebih lanjut dari kelas menengah. "Trials and errors" tak dapat dihindari, tetapi suatu pengelolaan yang tepat terhadap proses itu pasti akan menjamin adanya dukungan yang diperlukan dari mayoritas penduduk terhadap proses itu sendiri maupun hasil-hasilnya.

Kedua, dalam hal pembangunan/pengembangan institusi-institusi politik: baik badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa lainnya.

Berkembangnya institusi-institusi pemerintahan, sehingga dapat berfungsi secara tepat, merupakan bagian yang terpenting dalam pembangunan sistem politik nasional. Suatu badan eksekutif yang kuat sangat diperlukan dalam membentuk dasar yang kukuh bagi pembangunan nasional. Selanjutnya, diperlukan adanya keseimbangan antara badan eksekutif yang kuat dan badan legislatif yang tanggap terhadap aspirasi-aspirasi rakyat. Bila keseimbangan ini tidak ada, sistem itu akan menjadi terlalu kaku dan represif.

Agar badan legislatif dapat memainkan peranannya sebagaimana mestinya, partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa lainnya harus diberi kesempatan untuk berkembang. Badan yudikatif harus memainkan peranan penting sebagai suatu lembaga pengadilan yang dihormati dalam menyelesaikan konflik-konflik kepentingan baik dalam masyarakat sendiri maupun antara pemerintah dengan masyarakat.

Pembangunan politik yang demikian itu harus mampu memobilisasi dukungan rakyat dan mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam pergantian kepemimpinan nasional tanpa harus menimbulkan huru-hara nasional.

Negara-negara ASEAN, kecuali Pilipina, boleh dikatakan cukup berhasil dalam usaha-usaha pembangunan politiknya dilihat dari tanggapnya sistem politik terhadap tuntutan-tuntutan rakyat. Tanpa adanya dukungan rakyat tampaknya sistem politik itu tidak akan mampu bertahan selama dua puluh tahun terakhir ini, termasuk di Indonesia walaupun ada dukungan dari kalangan Angkatan Bersenjata. Memang masih terdapat sejumlah masalah mendesak dan jangka panjang di masing-masing negara ASEAN, namun sistem yang ada sekarang akan mampu bertahan, paling tidak, hingga akhir abad ini.

Seperti halnya LDP di Jepang, suatu sistem satu partai politik yang dominan yang ada di Indonesia (Golkar), Malaysia (UMNO), dan Singapura (PAP) tampaknya akan terus berlangsung. Demikian pula halnya kontinuitas peranan politik angkatan bersenjata di Indonesia dan Muangthai akan berkelanjutan. Pertanyaan yang selalu muncul di kalangan Barat mengenai kapan angkatan bersenjata itu akan meninggalkan peranan politiknya bukanlah merupakan pertanyaan yang relevan selama mereka dapat berperanan dalam pemeliharaan stabilitas politik di dalam negeri. Bahkan barangkali Pilipina akan lebih tergantung pada angkatan bersenjatanya mengingat kenyataan bahwa angkatan bersenjata tinggal menjadi satu-satunya unsur bagi pemeliharaan stabilitas di dalam negeri.

Dari berbagai tugas pemerintahan di berbagai negara sedang berkembang, barangkali pembangunan sosial kebudayaan merupakan bagian yang paling sulit. Pemeliharaan nilai-nilai setempat dalam era yang sedang mengalami

perubahan-perubahan cepat sebagai akibat dari, dan adaptasinya terhadap dampak dari, pembangunan ekonomi, revolusi teknologi, kemajuan-kemajuan dalam sistem transportasi dan komunikasi, merupakan tugas berat yang harus dilakukan. Dalam keadaan demikian, orang masih bisa optimis bila ia mempertimbangkan kemampuan akulturasi bangsa-bangsa dan kebudayaan Asia Tenggara pada abad-abad yang lampau di mana mereka mampu menyerap pengaruh-pengaruh dari kebudayaan-kebudayaan Hindu, Buddha, Islam, maupun Cina dan Barat.

Secara keseluruhan, negara-negara ASEAN -- kecuali Pilipina -- telah cukup berhasil dalam mengatasi tantangan-tantangan utamanya, yaitu dalam mengembangkan negara dan bangsa kurang lebih secara berimbang dan komprehensif demi memenuhi aspirasi-aspirasi dan tuntutan-tuntutan rakyat mereka yang semakin meningkat. Kasus Pilipina akan dibicarakan secara agak panjang pada bagian berikutnya.

Walaupun terdapat beberapa kekurangan, kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh negara-negara ASEAN adalah sangat mengesankan bila dibandingkan dengan berbagai kegagalan dan krisis-krisis nasional pada masa lalu. Percobaan kudeta yang gagal dari PKI pada tahun 1965 merupakan titik puncak dari salah-urus dalam hampir semua bidang kehidupan. Terdapat contoh-contoh dari negara-negara lain di ASEAN, mungkin kurang mencekam bila dibandingkan dengan peristiwa tahun 1965 di Indonesia, tetapi yang boleh jadi akan membawa akibat krisis nasional dengan implikasi-implikasinya yang berat jika tidak diatasi pada waktunya. Termasuk dalam hal ini adalah peristiwa 13 Mei 1969 yang merupakan konflik rasial di Malaysia, dan pemberontakan mahasiswa di Muangthai tahun 1973.

Kini di negara-negara ASEAN (kurang lebih demikian halnya di Pilipina) tidak terdapat masalah salah-urus yang serius yang bisa mengakibatkan krisis nasional yang gawat dalam waktu dekat ini. Kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi negara-negara ASEAN dewasa ini dapat dikendalikan, sementara prospek masa depan mereka tetap cerah. Demikian pula, beberapa persoalan politik yang ada dapat diatasi. Dalam hal ini termasuk masalah hubungan angkatan bersenjata dan partai-partai politik di Muangthai, hubungan antara pemerintah dan Kesultanan di Malaysia, revitalisasi dan reorganisasi Golkar, partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa di Indonesia, dan apa yang disebut masalah pergantian kepemimpinan di Singapura.

PERKEMBANGAN-PERKEMBANGAN DI PILIPINA

Bagian ini, yang secara khusus membahas Pilipina, dapat dipandang sebagai suatu studi kasus tentang suatu keadaan di mana memburuknya per-

ekonomian yang disertai oleh diabaikannya pembangunan politik dapat mengakibatkan ketidakstabilan yang gawat. Yang penting adalah bagaimana orang-orang Pilipina akan mengatasi masalah-masalah mereka sekarang. Dalam analisa ini, paling-paling kita hanya dapat membuat suatu perkiraan mengenai arah perkembangan di Pilipina pada masa yang akan datang.

Di antara negara-negara ASEAN, Pilipina merupakan satu-satunya negara yang memiliki beberapa kesamaan dengan negara-negara di Amerika Latin, dalam kebudayaannya, dan situasi sosial-politik dan sosial-ekonominya. Sebagai akibat dari penjajahan Spanyol selama kurang lebih empat abad, ekonomi negeri itu hingga saat ini dikuasai oleh beberapa keluarga saja, dan jurang (gap) antara kelas atas dan kelas bawah sangat besar. Sistem politik Pilipina sangat terpengaruh oleh tradisi politik Amerika dan sangat liberal hingga tahun 1972 ketika Presiden Marcos mengumumkan berlakunya Undang-undang Darurat.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Pilipina dewasa ini sebagian bermula dari sejarah dan kebudayaan bangsa tersebut, yang pada gilirannya -- sampai tingkat tertentu -- juga akan mempengaruhi cara bagaimana pemimpin-pemimpinnya sekarang menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Krisisnya

Krisis yang terjadi di Pilipina sekarang, pada dasarnya, dimulai dengan terjadinya stagnasi ekonomi dalam waktu empat tahun terakhir ini. Pertumbuhan ekonominya begitu menurun sehingga menjadi yang terendah di antara perekonomian negara-negara ASEAN. Tingkat pertumbuhan penduduk tetap tinggi, sekitar 2,5% setiap tahunnya, dan hutang luar negerinya mengalami peningkatan yang dramatis dari kira-kira US\$ 2 milyar pada tahun 1972 menjadi lebih dari US\$ 20 milyar pada tahun 1983. Indikator ekonomi makronya juga menunjukkan terjadinya kemunduran-kemunduran dalam bidang perekonomian pada umumnya, sementara dislokasi-dislokasi yang disebabkan oleh stagnasi ekonomi dirasakan secara tidak seimbang (disproportionately) oleh penduduk yang berpendapatan rendah dan menengah. Menurunnya harga-harga komoditi, sebagai akibat dari resesi dunia dewasa ini, sangat mempengaruhi pendapatan para petani.

Sebenarnya, Undang-undang Darurat dapat diterima sebagai suatu sarana yang memungkinkan pemerintah melakukan pembangunan ekonomi yang lebih giat demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marcos memahami pentingnya pembangunan ekonomi yang akan memberikan legitimasi bagi pemerintahannya. Namun, dalam perjalanan waktu menjadi nyata bahwa keluarga

Marcos dan teman-teman dekatnya adalah pihak-pihak yang paling banyak menikmati pembangunan/kemajuan itu.

Dengan memburuknya (dan salah-urus) dalam bidang ekonomi, perhatian masyarakat menjadi lebih tertuju kepada proses-proses politik. Pembangunan politik telah diabaikan oleh Marcos. Baru dalam waktu dua tahun terakhir dalam periode Undang-undang Darurat saja Marcos mulai mencoba membangun partai politiknya, yaitu *Kilusang Bagong Lipunan* (KBL) atau Gerakan Masyarakat Baru, yang menghimpun bekas-bekas anggota partainya, Nacionalista Party, dan unsur-unsur (baru) lainnya. Kemudian, semacam lembaga legislatif dibentuknya, yaitu *Batasang Pambansa* (Majelis Nasional), yang dianggap tidak sah oleh partai-partai politik dan pendapat umum pada umumnya oleh karena prosedur pemilihannya, di mana mereka tidak dapat ikut serta secara penuh. Jadi, pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota *Batasang Pambansa* yang dilaksanakan tahun ini akan mempunyai pengaruh penting terhadap arah perkembangan politik Pilipina di masa depan.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ini terlihat beberapa peristiwa yang dipandang oleh kelompok-kelompok oposisi dan kelompok-kelompok lain sebagai langkah-langkah Marcos untuk mempersiapkan dinastinya jika ia harus memutuskan untuk mengundurkan diri. Jadi, keluarga Marcos dan Romualdez telah mendominasi panggung politik Pilipina.

Kelompok oposisi moderat, yaitu Organisasi Persatuan Demokrasi Nasional (UNIDO), suatu koalisi dari 12 partai dan satu kelompok lain yang dibentuk oleh Senator Laurel, yang mencoba mencari jalan/alternatif terhadap Marcos, secara bertahap menjadi lemah. Sebagai akibatnya, dalam beberapa tahun terakhir ini hanya terlihat adanya dua skenario post-Marcos:

- a. Ny. Imelda Marcos, dengan dukungan angkatan bersenjata, akan mengambil alih kekuasaan apabila terjadi sesuatu atas Marcos;
- b. Partai Komunis Pilipina, melalui taktik front persatuannya, dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan anti-Marcos dalam Front Demokrasi Nasional (National Democratic Front, NDF) dan bekerjasama dengan National People's Army (NPA).

Pada umumnya diperkirakan, sampai dengan terbunuhnya Aquino, bahwa skenario pertama adalah yang paling mungkin terjadi. Namun juga disadari bahwa pada saatnya rakyat akan bangkit melawan suatu rezim yang demikian itu, yang akan mengakibatkan perang saudara seperti di Nikaragua atau El Salvador. Dalam keadaan demikian itu, bisa jadi skenario yang kedua muncul.

Akan tetapi skenario yang pertama tidak lagi mempunyai kesempatan luas setelah terbunuhnya Aquino. Banyak pihak, termasuk anggota-anggota KBL telah menuding -- benar atau salah -- Imelda Marcos dan Jenderal Ver, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pembunuhan Aquino. Lagi pula, kebimbangan telah meningkat terhadap kemungkinan terjadinya koalisi antara Ny. Imelda Marcos dan Angkatan Bersenjata. Angkatan Bersenjata Pilipina tidak mempunyai tradisi keterlibatan dalam masalah-masalah politik dan sosial negeri itu. Hal itu tentu berbeda sekali dengan keadaan di Indonesia. Sebaliknya, Angkatan Bersenjata Pilipina mengikuti tradisi Amerika Serikat, dan bahkan meskipun di bawah pemerintahan Undang-undang Darurat mereka terlibat dalam masalah-masalah non-militer, partisipasi mereka pada umumnya sangat terbatas oleh karena perhatian mereka terpusat pada MNLF (Moro) di Pilipina Selatan dan NPA di berbagai bagian negeri itu.

Terdapat pula spekulasi-spekulasi bahwa PM Virata dan kelompok teknokratnya merupakan kemungkinan lain bagi pengganti Marcos. Skenario ini juga tidak terlalu diperhitungkan, berhubung seorang teknokrat di pucuk pimpinan nasional mungkin sekali tidak akan memadai dalam menangani Pilipina pada masa yang akan datang dalam era post-Marcos.

Jadi, karena tidak adanya alternatif-alternatif yang meyakinkan, spekulasi dewasa ini telah mengarah kepada kemungkinan pengambilalihan kekuasaan oleh pihak angkatan bersenjata -- terutama karena pertimbangan keharusan -- bila sesuatu terjadi atas diri Marcos. Dalam hal yang demikian itu, kepemimpinan angkatan bersenjata mungkin beralih dari tangan Jenderal Ver kepada Letjen Fidel Ramos, Jr., Deputy Kepala Staf, yang dianggap sebagai seorang yang "bersih" dan dihormati di kalangan militer. Beberapa pihak masih menyangsikan kemampuan Ramos, namun sejauh ini, dia tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin angkatan bersenjata.

Meskipun ada berbagai skenario dan spekulasi, adalah diakui, baik di dalam negeri maupun di luar Pilipina, bahwa selama Presiden Marcos dapat mempertahankan kesehatannya, dan karena itu dapat tetap mampu mengendalikan pikirannya, ia akan tetap mampu menguasai kendali kekuasaan dan menguasai angkatan bersenjata, yang pada dasarnya adalah taat kepadanya. Penduduk pada umumnya, kecuali ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah, masih tetap mengakui kekuatan Marcos. Akan tetapi bila kesehatannya dianggap tidak menguntungkan, maka spekulasi akan terus terjadi. Ketidakmenentuan yang demikian besar ini akan menjadi sumber utama dari ketidakstabilan di dalam negeri.

Ketidakpastian di sekitar kesehatan Marcos adalah alasan utama bagi Aquino untuk kembali ke Pilipina, kendati ada peringatan dari berbagai pihak. Maksud Aquino adalah secara pribadi menghimbau Marcos agar mau menerima untuk secara bersama-sama mempersiapkan era post-Marcos. Dengan melakukan cara itu, Aquino percaya bahwa perang saudara dan bahkan pengambilalihan kekuasaan oleh Partai Komunis dapat dihindari.

Usul Aquino adalah agar kepemimpinan nasional melakukan suatu pembangunan politik secara bertahap -- tetapi yang dapat dipercaya -- mulai dengan penyelenggaraan Pemilu pada tahun 1984 untuk memilih anggota-anggota Majelis Nasional, yang akan mengarah kepada persaingan terbuka dan jujur untuk pemilihan Presiden pada tahun 1987. UNIDO harus diberi kesempatan untuk memainkan peranannya sebagai suatu kelompok oposisi yang tanggung, sementara KBL melakukan konsolidasi ke dalam sendiri. Kebebasan pers perlu dipulihkan kembali.

Aquino mengakui bahwa ia tidak akan mampu bersaing menghadapi "mesin" rezim Marcos pada permulaannya, tetapi bagi dia prosesnya adalah aspek yang lebih penting dalam memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan politik dan dalam mencegah terjadinya perang saudara.

Apa yang masih belum jelas dalam rencana Aquino adalah peranan dari angkatan bersenjata. Kelompok militer telah menjadi lebih kuat dan telah melipattigakan jumlah personilnya selama rezim Undang-undang Darurat. Karena itu adalah tidak realistis untuk mengharapkan agar kelompok militer menyerahkan begitu saja kekuasaannya dalam waktu sekejap.

Masa Depan

Masa depan Pilipina yang mendesak adalah terletak dalam usahanya mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian ekonomi, seperti yang diajukan oleh IMF dan Bank Dunia untuk jangka waktu beberapa tahun, kini tak dapat dihindari lagi dan karena itu, harus dilaksanakan dalam kondisi yang paling sulit. Terdapat alasan-alasan bahwa masalah-masalah ekonomi, bagaimanapun beratnya, dapat diatasi, atau setidaknya-tidaknya dapat dikendalikan, dalam jangka menengah.

Masalah utama perekonomiannya tidak terletak pada pengelolaan ekonomi tetapi ia bersifat politis: ia berkaitan dengan masalah kepercayaan. Jadi tantangan utama dan nyata bagi Presiden Marcos adalah bagaimana meng-

atasi masalah-masalah politik kritis negeri itu. Dalam jangka pendek, terdapat tiga hal yang harus segera ditangani sungguh-sungguh:

- a. penyelidikan pembunuhan terhadap Aquino menurut cara-cara yang layak;
- b. masalah suksesi/pergantian kepemimpinan;
- c. masalah kerukunan nasional.

Dua masalah yang disebutkan terakhir tidak dapat diselesaikan tanpa kesiediaan dan persiapan-persiapan yang sungguh-sungguh dari pihak Marcos untuk melakukan pembangunan politik. Situasinya memang sangat kompleks.

Diabaikannya pembangunan politik oleh Marcos pada masa lalu telah menimbulkan akibat-akibat yang sangat mahal dewasa ini, khususnya karena waktu makin mendesak mengingat kondisi kesehatan Marcos sendiri. Karena itu, terpaksa banyak hal harus dilakukan dalam waktu yang pendek ini.

Tambahan lagi, KBL tidak tampak menampilkan calon-calon yang sudah ternama di samping Imelda Marcos dan Juan Ponce Enrile, Menteri Pertahanan. Tetapi pada akhirnya, siapa pun yang akan menggantikan Marcos, ia harus mampu memobilisasi dukungan dari angkatan bersenjata. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan bersenjata sungguh-sungguh menjadi suatu faktor penting dalam menentukan arah perkembangan Pilipina di masa depan.

Karena sempitnya alternatif, tentu saja angkatan bersenjata tampaknya akan harus mengambil alih kekuasaan bila Marcos segera surut dari panggung politik. Ini tidak berarti bahwa pihak militer akan melakukan itu tanpa menghadapi sesuatu rintangan pun. Sementara pihak militer sendiri mungkin tidak sepenuhnya siap mengambil alih kekuasaan, masyarakat luas mungkin akan mengkhawatirkan hal itu. Persatuan di kalangan angkatan bersenjata tidak diketahui benar sampai mereka menghadapi suatu ujian. Tampaknya akan cenderung terjadi semacam koalisi antara militer, teknokrat, dan beberapa tokoh politik dari KBL atau dari kelompok lain. Presiden Marcos tampaknya juga menyadari kemungkinan demikian itu melalui tindakan-tindakannya akhir-akhir ini dalam mengikutsertakan militer lebih dekat lagi dalam masalah-masalah pemerintahan.

UNIDO juga menghadapi masalah kepemimpinan. Karena itu patut dipertanyakan apakah UNIDO akan tetap dapat terorganisasi sebagai suatu kekuatan oposisi yang efektif dalam sistem politik Pilipina. Kurangnya kepemimpinan dalam UNIDO telah memaksa sejumlah besar anggota-anggota mudanya bergabung dengan NDF atau NPA. Beberapa anggota lainnya bergabung dengan berbagai gerakan yang muncul tidak lama setelah Aquino terbunuh. "Jaja," yang berarti "Keadilan untuk Aquino, keadilan untuk

semua," yang dipimpin oleh bekas Senator Tenada dan Diokno, dan didukung oleh sektor swasta, mahasiswa, dan unsur-unsur kiri dalam NDF, telah memilih garis radikal mengenai beberapa masalah, termasuk mengenai pangkalan Amerika Serikat di Pilipina.

"Komite Rekonsiliasi Pengusaha" (the Businessmen's Committee for Reconciliation), yang dipimpin oleh Jaime Ongpin, merupakan gerakan lainnya yang mendapatkan dukungan massa. Tetapi masih harus ditunggu apakah berbagai gerakan ini dapat memainkan peranan penting dalam mempengaruhi perkembangan politik negara itu dan masa depannya.

Masalah-masalah lain menambah kompleksitas keadaan. Pemberontakan Moro di Selatan dan kegiatan-kegiatan gerilya NPA di berbagai bagian negara itu, seperti yang ada sekarang, tidak menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan negara, tetapi mereka dapat mengacaukan setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik secara ekonomi maupun politik. Hubungan antara Pilipina dan Amerika Serikat tampaknya akan mengalami suatu periode yang paling sulit.

Kendati banyak persoalan yang sedang dihadapi Pilipina dewasa ini, spekulasi bahwa negara itu telah cukup masak untuk dilancarkannya suatu revolusi tampaknya tidak berdasar, paling tidak untuk jangka empat sampai lima tahun yang akan datang. Sementara perubahan-perubahan mungkin terjadi, suatu sistem yang sama sekali lain tampaknya tidak akan menggantikan sistem yang kini berlaku. Bahkan agar tergesa-gesa untuk berspekulasi akan bangkitnya dan segera terjadinya pengambilalihan kekuasaan oleh Partai Komunis. Gereja Katolik, meskipun terlihat mengendalikan diri dari campur tangan langsung dalam proses politik, pasti akan melawan pengambilalihan kekuasaan oleh kaum komunis. Amerika Serikat juga berkepentingan terhadap "status quo" dalam pengertian di atas, meskipun akan menerima terjadinya perubahan-perubahan dalam personil.

Negara-negara ASEAN lainnya pasti berkepentingan dalam memelihara stabilitas regional dan akan berusaha membantu mencari jalan untuk menghindari terjadinya perkembangan-perkembangan yang membahayakan di Pilipina. Apa yang dapat mereka lakukan terutama akan berkaitan dengan bidang perekonomian, misalnya dengan melakukan pendekatan bersama dalam berbagai forum internasional dan dalam diplomasi bilateral mereka agar tersedia bantuan ekonomi dan keuangan yang memadai bagi perekonomian Pilipina. Hanya orang-orang Pilipina sendirilah yang akan menyelesaikan masalah-masalah politik di dalam negeri mereka.